



STUDI TENTANG PARTISIPASI PERUSAHAAN SWASTA
DALAM PELAKSANAAN KESEHATAN DAN
KESELAMATAN KERJA DI KOTAMADYA
UJUNG PANDANG



PERPISTAKAAN	UNIVERSITAS HASANUDDIN
Tgl terbit	20-03-90
Asal dari	fak. Kes. Masyarakat
tanpakaya	Satu (1) ek.
harga	Hadis
No. Inventaris	90040868
No. Klas	

MIRWAN AKIB NIM : 8104102
KAHARUDDIN YUNUS NIM : 8204049

LABORATORIUM ILMU KESEHATAN MASYARAKAT DAN ILMU
KEDOKTERAN PENCEGAHAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
UJUNG PANDANG

1989

LABORATORIUM ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
DAN ILMU KEDOKTERAN PENCEGAHAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
UJUNGPAJARAN



PAPER INI TELAH DISETUJUI OLEH PENGARAH UNTUK
DICETAK DAN DIPERBANYAK PADA :

H A R I :

T A N G G A L :

Pengarah
Makmur Selomo

Dr. MAKMUR SELOMO, M.S.

NIP 131 572 066.

PAFER INI TELAH DIUJIKAN PADA :

H A R I : S A B T U

TANGGAL : 27 JANUARI 1990

TEMPAT : LABORATORIUM IKH / IKP

KETUA TIM PENGUJI MERANGKAP ANGGOTA

Dr. RASDI NAWI, MS.

.....

ANGGOTA

Dr. NOER BAHRY NOOR, MS.

.....

ANGGOTA

Dr. BURAEERAH H. ABD. HAKIM, MS

.....

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji kami panjatkan ke hadirat Ilahi, yang hanya karena pertolongan-Nya jualah, sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan paper ini dengan judul :

" STUDI TENTANG PARTISIPASI PERUSAHAAN SWASTA
DALAM PELAKSANAAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
DI KOTAMADYA UJUNG Pandang. "

Paper ini kami buat sebagai salah satu persyaratan penyelesaian kepaniteraan klinik pada Laboratorium Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Kedokteran Pencegahan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin.

Berbagai kesulitan kami dapatkan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan penelitian hingga penyelesaian tulisan ini. Namun atas bantuan, bimbingan, dan arahan serta kerja sama yang baik dari berbagai pihak, akhirnya kesulitan tersebut dapat kami atasi. Untuk itu, melalui kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Dosen pengarah utama dalam penulisan paper ini, Bapak Dr. Makmur Selomo, MS.
2. Bapak Ketua beserta seluruh staf dosen Laboratorium Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Kedokteran Pencegahan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Pimpinan fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Ujung Pandang bersama seluruh staf.

4. Bapak Kepala Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Propinsi Sulawesi Selatan beserta staf.
5. Bapak Kepala Kantor Sosial Politik Kotamadya Daerah Tingkat II Ujungpandang beserta staf.
6. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujungpandang beserta staf.
7. Para pimpinan perusahaan yang dengan ikhlas bersedia menjadi responden kami.
8. Semua pihak yang telah membantu kami dalam penyusunan paper ini.

Doa-moga atas segala bantuan yang diberikan dalam penyelesaian tulisan ini mendapat ganjaran kebaikan yang berlipat ganda di sisi-Nya.

Akhirnya, kami menyadari masih banyak kekurangan yang terdapat dalam paper ini. Olehnya itu saran dan koreksi yang bersifat positif akan kami terima dengan hati terbuka. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam menunjang penerapan norma-norma kesehatan dan keselamatan kerja bagi perusahaan di tanah air tercinta. Amin.

Wassalam

Penulis

Ujungpandang, Januari 1990

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	yii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
RINGKASAN	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Perumusan masalah	1
B. Latar belakang masalah	6
C. Batasan topik	7
D. Tujuan penulisan	7
E. Metode penelitian	8
BAB II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
A. Struktur organisasi dan personalia	9
B. Pelayanan kesehatan, keselamatan kerja dan kesejahteraan karyawan	12
BAB III. TINJAUAN KEPUSTAKAAN	
A. Tinjauan tentang partisipasi	13
B. Tinjauan tentang perusahaan	17
C. Tinjauan tentang kesehatan dan ke- selamatan kerja	21

BAB	IV. KERANGKA KONSEPSIONAL	26
BAB	V. METODOLOGI	
	A. Tahap persiapan	33
	B. Tahap perencanaan	35
	C. Tahap pelaksanaan	42
	D. Tahap pengolahan dan analisa data .	43
BAB	VI. PEMBAHASAN HASIL DAN MASALAH YANG DITE- RUKAN	
	A. Pembahasan hasil	52
	B. Masalah yang ditemukan	56
BAB	VII. D I S K U S I	59
BAB	VIII. KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan	62
	B. Saran-saran	63
	DAFTAR PUSTAKA	64
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	65

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Hubungan pengetahuan pimpinan tentang kesehatan dan keselamatan kerja dengan pelaksanaannya pada perusahaan industri swasta di Kotamadya Ujungpandang, Desember 1989.	45
2. Hubungan besar kecilnya perusahaan dengan pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja pada perusahaan industri swasta di kotamadya Ujungpandang, Desember 1989.	46
3. Hubungan lamanya perusahaan beroperasi dengan pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja pada perusahaan industri swasta di Kotamadya Ujungpandang, Desember 1989.	47
4. Gambaran pengetahuan pimpinan tentang kesehatan dan keselamatan kerja dengan pelaksanaannya pada perusahaan industri swasta baru di Kotamadya Ujungpandang, Desember 1989.	48

Tabel	Halaman
5. Gambaran pengetahuan pimpinan tentang kesehatan dan keselamatan kerja dengan pelaksanaannya pada perusahaan industri swasta kecil di Kotamadya Ujungpandang, Desember 1989.	49
6. Gambaran pengetahuan pimpinan tentang kesehatan dan keselamatan kerja dengan pelaksanaannya pada perusahaan industri swasta lama di Kotamadya Ujungpandang, Desember 1989.	50
7. Gambaran pengetahuan pimpinan tentang kesehatan dan keselamatan kerja dengan pelaksanaannya pada perusahaan industri swasta besar di kotamadya Ujungpandang, Desember 1989.	51
8. Jumlah dan prosentase responden dipinci menurut tingkat pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja terhadap jenis variabel pada perusahaan industri swasta di Kotamadya Ujungpandang , Desember 1989.	67

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Skema kerangka konsep	32

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1. Tabulasi data primer hasil survei pada perusahaan industri swasta di Kotamadya Ujungpandang, Desember 1989.
- LAMPIRAN 2. Jumlah dan prosentase responden diperinci menurut tingkat pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja terhadap jenis variabel pada perusahaan industri swasta di Kotamadya Ujungpandang, Desember 1989
- LAMPIRAN 3. Daftar pertanyaan.
- LAMPIRAN 4. Penilaian pertanyaan pengetahuan.
- LAMPIRAN 5. Nama dan alamat perusahaan yang diambil sebagai sampel.

RINGKASAN

Tujuan utama dari kesehatan dan keselamatan kerja adalah untuk menciptakan tenaga kerja yang sehat dan produktif, dan tujuan ini dapat tercapai bilamana perusahaan tempat karyawan bekerja turut berpartisipasi melaksanakannya. Namun kenyataannya pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja di perusahaan-perusahaan swasta belum diupayakan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari pihak pimpinan maupun dari tenaga kerja perusahaan. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah : pendidikan pimpinan dan karyawan, pengetahuan pimpinan dan karyawan tentang kesehatan dan keselamatan kerja, lamanya perusahaan beroperasi, jumlah karyawan, jenis usaha produksi, penerapan undang-undang tentang kesehatan dan keselamatan kerja.

Tujuan penulisan paper ini untuk melihat partisipasi perusahaan industri swasta dalam pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja dalam hubungannya dengan tingkat pengetahuan pimpinan tentang kesehatan dan keselamatan kerja, besar kecilnya perusahaan dan lamanya perusahaan beroperasi. Untuk maksud tersebut kami telah melakukan survei pada beberapa perusahaan industri swasta di Kotamadya Ujungpandang sejak tanggal 27 Nopember s/d 9 Desember 1989, dengan metode

" cross sectional study." Pengambilan sampel secara " non-proporsional stratified random sampling " dan responden adalah pimpinan perusahaan atau yang mewakilinya.

Setelah memperoleh data dari hasil survei, data kami olah secara manual dan kalkulator serta disajikan dalam bentuk tabel. Hipotesis yang diuji adalah hipotesis nol (H_0) dengan tingkat kepercayaan 90 % dan $\alpha = 0,1$, serta uji hipotesis dengan menggunakan rumus Z.

Uari hasil survei terlihat bahwa faktor pengetahuan pimpinan tentang kesehatan dan keselamatan kerja berperan besar dalam pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja.

Agar pelaksanaan program kesehatan dan keselamatan kerja di perusahaan swasta dapat ditingkatkan, maka diperlukan peningkatan pengetahuan pimpinan melalui penangan/penataran, pengawasan dan evaluasi yang lebih intensif dari instansi yang berwenang terutama dari Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja, serta peningkatan kerja sama antara instansi lain yang terkait.

B A B I

P E N D A H U L U A N

A. PERUMUSAN MASALAH

Penggunaan teknologi merupakan syarat mutlak bagi pembangunan dan modernisasi setiap negara dan bangsa di dunia abad ini. Itu tidak perlu dipersoalkan lagi. Namun, bahwa teknologi bukanlah alat atau wahana yang netral, memang banyak yang belum sadar. Salah satu dampak negatif yang tidak dapat diabaikan adalah pengaruhnya terhadap kehidupan manusia khususnya pada para tenaga kerja dan masyarakat sekitar suatu pusat industri.

Oleh karena itu jika tujuan pembangunan nasional mengharapkan pembentukan manusia Indonesia seutuhnya, maka peranan perusahaan-perusahaan, lembaga-lembaga dan kelompok-kelompok masyarakat sangat dibutuhkan partisipasinya. Istilah partisipasi sebenarnya diambil dari bahasa asing "participation", yang berarti mengikut sertakan pihak lain. Bintiro Tjokroamidjoho mengartikan partisipasi masyarakat sebagai keterlibatan dalam :

- a. Penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan kegiatan.
- b. Memikul beban dan pelaksanaan kegiatan.

c. Memetik hasil dan manfaat kegiatan secara berkeadilan.

Istilah Kesehatan dan Keselamatan Kerja, sebenarnya menampung dua disiplin ilmu medis yaitu Kesehatan Kerja dan Keselamatan Kerja. Kesehatan Kerja adalah spesialisasi ilmu kesehatan/kedokteran beserta prakteknya yang bertujuan agar pekerja atau masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, baik fisik, mental maupun sosial. Sedangkan Keselamatan Kerja adalah keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan. Melihat tujuan dan sasaran kedua disiplin ilmu ini, maka tidak beralasan jika suatu perusahaan untuk tidak melaksanakannya.

Perusahaan swasta yang merupakan satu bentuk perusahaan dimana didalamnya terdapat kelompok-kelompok tenaga kerja yang melakukan kegiatan untuk menghasilkan produk, dengan demikian jelas tenaga kerja adalah merupakan unsur potensial, juga tidak dapat terlepas dari kewajiban melaksanakan kesehatan dan keselamatan kerja, sehingga dapat meningkatkan efisiensi kerja yang optimal dan sebaik-baiknya serta produktifitas kerja.

"Jumlah angkatan kerja terus meningkat yaitu dari 55 juta pada tahun 1981 menjadi 87 juta pada tahun 2000, oleh karena itu upaya kesehatan yang ditunjukkan untuk angkatan kerja tersebut perlu mendapat perhatian yang memadai, sehingga mereka lebih produktif dan pada akhirnya akan mampu menunjang sumber daya pembiayaan untuk upaya kesehatan" 1).

Kesehatan Kerja, merupakan disiplin ilmu yang selalu disertakan dengan satu disiplin ilmu lainnya yaitu Higene Perusahaan, dan begitu eratnyan keterkaitan kedua disiplin ilmu ini, sehingga sering digunakan semboyan "Higene Perusahaan dan Kesehatan Kerja adalah kerjasamaa stetoskop dan garis hitung". Hakekat Higene Perusahaan dan Kesehatan Kerja adalah :

1. Sebagai alat untuk mencapai derajat kesehatan tenaga kerja yang setinggi-tingginya, baik buruh, petani, nelayan, pegawai negeri atau pekerja-pekerja bebas, dengan demikian dimaksudkan untuk kesejahteraan tenaga kerja.
2. Sebagai alat untuk meningkatkan produksi yang berlandaskan kepada meningkatnya efisiensi dan daya produktifitas faktor manusia dalam produksi " 2).

Oleh karena hakekat tersebut selalu sesuai dengan maksud dan tujuan pembangunan didalam suatu negara,

1). Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Sistem Kesehatan Nasional, Jakarta, 1982, hal 25.

2). Sumamur, RK : Higene Perusahaan dan Kesehatan, edisi 1, Jakarta, 1984, hal 2.

maka higene perusahaan dan kesehatan kerja selalu diikuti sertakan dalam pembangunan.

Tujuan utama Higene Perusahaan dan Kesehatan Kerja diperinci sebagai berikut :

- * Pencegahan dan pemberantasan penyakit-penyakit, kecelakaan-kecelakaan akibat kerja, pemeliharaan dan peningkatan kesehatan dan gizi tenaga kerja, perawatan dan mempertinggi efisiensi dari produktifitas tenaga manusia, pemberantasan kelelahan kerja, dan pelipatan ke gairahan serta kenikmatan kerja, perlindungan bagi masyarakat sekitar suatu perusahaan agar terhindar dari bahaya pengotoran oleh bahan-bahan dari perusahaan yang bersangkutan dan perlindungan masyarakat luas dari bahaya-bahaya yang mungkin timbul oleh produk-produk industri (2 & 3).

Keselamatan kerja yakni satu segi penting dari perlindungan tenaga kerja. Dalam hubungan ini, bahaya yang dapat timbul dari mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, keadaan lokasi kerja, lingkungan, cara melakukan pekerjaan, karakteristik fisik dan mental dari pekerja harus sejauh mungkin diberantas atau dikendalikan. Keselamatan kerja sangat erat hubungannya dengan peningkatan produksi dan produktifitas pekerja.

Dalam hubungannya situasi dan kondisi di Indo-

30. Sumamur, PK : Higene, perusahaan dan kesehatan kerja, edisi 4, Jakarta, hal 22.

nesia, maka salah satu penilaian keselamatan kerja adalah :

" Keselamatan kerja adalah sarana utama untuk pencegahan kecelakaan, cacat dan kematian sebagai akibat kerja. Keselamatan kerja yang baik adalah pintu gerbang bagi keamanan tenaga kerja. Kecelakaan selain menjadi sebab hambatan-hambatan langsung juga merupakan kerugian-kerugian secara tidak langsung yakni kerusakan mesin dan peralatan kerja terhentinya proses produksi untuk beberapa saat, kerusakan pada lingkungan kerja dan lain-lain. Biaya-biaya sebagai akibat kecelakaan kerja baik langsung maupun tidak langsung cukup bahkan kadang-kadang sangat atau terlampaui-pau besar, sehingga bila diperhitungkan secara nasional hal itu merupakan kehilangan berjumlah besar " 4).

Perusahaan swasta dimana didalamnya terdapat kelompok-kelompok tenaga kerja yang melakukan kegiatan untuk menghasilkan produk, tidak dapat mengabaikan kesehatan dan keselamatan kerja ini. Permasalahannya sekarang apakah faktor pengetahuan pimpinan perusahaan, besar-kecilnya perusahaan dan lamanya perusahaan beroperasi berpengaruh terhadap partisipasi dalam pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja.

Dan ketiga faktor inilah yang merupakan objek penelitian yang kami lakukan.

4). Sumamur, PK : Keselamatan kerja dan pencegahan kecelakaan, edisi 3, Jakarta, 1987, hal 2.

B. LATAR BELAKANG MASALAH.

Dalam masyarakat yang sedang membangun dan salah satu aspek penting pembangunan adalah bidang ekonomi dan sosial, maka kesehatan dan keselamatan kerja lebih tampil kedepan lagi, dikarenakan cepatnya penerapan teknologi disertai segala seginya, termasuk problematik kesehatan dan keselamatan kerja yang demikian banyak menampilkan permasalahannya.

Suatu kenyataan bahwa dalam bekerja dan adanya rasa aman dalam melaksanakan tugas maupun kebutuhan-kebutuhan hidup, guna meningkatkan efektifitas dan produktifitas suatu perusahaan. Oleh karena itu kesehatan dan keselamatan kerja harus dikelola sebaik mungkin dengan suatu sistem terencana dan terarah. Perusahaan swasta sebagai pelaksana sistem tersebut perlu mengetahui dan melaksanakan kesehatan dan keselamatan kerja, paling tidak ikut berpartisipasi untuk menciptakan tenaga kerja yang sehat dan produktif sesuai dengan tujuan masing-masing.

Proses industrialisasi adalah syarat mutlak pembangunan Indonesia, oleh karena itu sebaiknya kita mempersiapkan diri agar tidak terulang kecerobohan-kecerobohan dan kesalahan-kesalahan di Negara lain.

C. BATASAN TOPIK

Masalah partisipasi perusahaan swasta dalam pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja sangat luas pembahasannya oleh karena menyangkut perundang-undangan keselamatan kerja dan undang-undang lain yang menyangkut kesehatan kerja. Oleh karena terbatasnya waktu dan fasilitas, maka penulisan p. per ini kami batasi pada perusahaan swasta yang bersifat industri. Dalam hal ini yang kami teliti adalah hubungan tingkat pengetahuan pimpinan tentang kesehatan dan keselamatan kerja terhadap pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja, hubungan antara besar kecilnya perusahaan dan pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja di perusahaan dan hubungan lamanya perusahaan beroperasi dengan pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja.

D. TUJUAN PENULISAN

1. Untuk menilai gambaran tentang partisipasi perusahaan swasta dalam pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja.
2. Sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian pada Laboratorium IKM / IKP Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin
3. Sebagai sumbangan ilmiah bagi penulis-penulis berikutnya.

E. METODE PENELITIAN

1. Tinjauan kepustakaan dan bahan kuliah.
2. Konsultasi dengan pembimbing dan pengarah serta seluruh staf dosen Laboratorium IKM / IKP Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin.
3. Seminar dan diskusi pada Laboratorium IKM / IKP Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin.
4. Survei lapangan.



B A B II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. STRUKTUR ORGANISASI DAN PERSONALIA

Perusahaan industri swasta yang berhasil dikunjungi selama penelitian di Kotamandya Ujung Pandang, adalah :

- Perusahaan industri tegel sebanyak 7 perusahaan.
- Perusahaan industri makanan sebanyak 18 perusahaan.
- Perusahaan industri minuman sebanyak 12 perusahaan.
- Perusahaan industri kayu 1 perusahaan.
- Perusahaan industri coldstorege 1 perusahaan.
- Perusahaan industri percetakan sebanyak 9 perusahaan.

Sebahagian besar perusahaan-perusahaan ini, merupakan perusahaan perseorangan, yang mana pimpinan perusahaan membaudahi langsung karyawan atau tenaga kerjanya. Untuk lebih terperinci dibawah ini dibicarakan struktur organisasi masing-masing jenis perusahaannya.

1. Perusahaan industri tegel.

Semua perusahaan industri tegel yang disurvei ternyata merupakan perusahaan perseorangan.

2. Perusahaan industri makanan.

Perusahaan industri makanan yang disurvei, juga semuanya merupakan perusahaan perseorangan, kecuali PT. Pyramid Negah Sakti merupakan perusahaan per-

seroan, yang mana pimpinan membawahi beberapa kepala bagian yakni kepala bagian masing-masing produksi, bagian penjualan, administrasi dan keuangan. Setiap kepala bagian ini membawahi sub-sub bagian kemudian kepada karyawan atau tenaga kerja.

3. Perusahaan industri minuman.

Seperti perusahaan sebelumnya, semua perusahaan yang berhasil disurvei mempunyai bentuk perusahaan perseorangan, kecuali PT. Tirta Permata Sari yang berbentuk perseroan dan dipimpin oleh seorang direksi yang dibantu oleh beberapa asisten direksi. Asisten direksi ini membawahi beberapa bagian, masing-masing biro keuangan dan pembukuan, biro perencanaan dan biro pemasaran, yang selanjutnya membawahi seksi-seksi dan seksi membawahi karyawan atau tenaga kerja.

4. Perusahaan industri kayu.

Perusahaan industri kayu yang berhasil disurvei adalah PT. Gimex, yang berbentuk perusahaan perseroan, yang struktur organisasinya dipimpin oleh seorang direktur dibantu oleh wakil direktur, membawahi beberapa bagian yaitu bagian pemasaran, administrasi, pengolahan dan keuangan, dan selanjutnya membawahi karyawan.

5. Perusahaan industri coldstorage.

Yang berhasil disurvei hanya PT. Kartika Mitra Sejati, dengan bentuk perusahaan perseroan dan susunan organisasinya sesuai dengan bentuk perusahaan perseroan lainnya.

6. Perusahaan industri percetakan.

Semua perusahaan industri percetakan yang berhasil disurvei, merupakan perusahaan perseorangan, kecuali CV. Alam, dengan bentuk perusahaan perseroan, yang dipimpin oleh seorang direksi dan dibantu oleh wakil direksi, susunan organisasi selanjutnya, seperti susunan organisasi perusahaan perseroan pada umumnya.

Jumlah personalia pada perusahaan berbeda-beda, sesuai besar kecilnya perusahaan. Begitu pula jumlah tenaga kerja yang bekerja diperusahaan mempunyai jumlah yang tidak sama, juga penggunaan tenaga kerja wanita tidak merata pada setiap perusahaan, tetapi tergantung jenis usaha produksi perusahaan itu. Misalnya, pada industri makanan, minuman, coldstorage dan percetakan tenaga kerjanya lebih didominasi oleh wanita. Sedangkan pada industri kayu dan tegel, tenaga kerjanya lebih didominasi oleh tenaga kerja pria.

Status karyawan atau tenaga kerja pada perusahaan pada umumnya adalah buruh lepas, terutama pada pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan khusus, sehingga kadang kala pada suatu waktu perusahaan mempunyai karyawan banyak dan pada saat lain karyawannya sedikit, misalnya pada musim panen dan musim tanam di daerah-daerah pertanian.

B. PELAYANAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA, SERTA KESEJAHTERAAN KARYAWAN

Perusahaan industri swasta di Kotamadya Ujungpandang yang berhasil disurvei semuanya telah menyediakan kotak P3K, sehingga bila terjadi kecelakaan ringan di perusahaan dapat segera diatasi. Dan bila terjadi kecelakaan sedang sampai berat, setelah diberikan pertolongan darurat selanjutnya dikirim ke tempat pelayanan kesehatan terdekat misalnya puskesmas atau rumah sakit. Beberapa perusahaan besar bahkan sudah ada yang memiliki paramedis atau dokter langganan yang diberi wewenang untuk memutuskan apakah seorang karyawan yang sakit akibat kerja atau tertimpa kecelakaan di tempat kerja perlu mendapat perawatan lebih lanjut.

Di samping sarana kesehatan, sebahagian besar perusahaan yang disurvei telah menyediakan alat-alat keselamatan kerja sesuai dengan jenis usaha produksinya, seperti kaos tangan, masker, dan sepatu kerja.

Mengenai kesejahteraan karyawan, pada umumnya mereka mulai bekerja dari pukul 08.00 sampai pukul 16.00, dengan waktu istirahat antara pukul 12.00 - 13.00. Waktu istirahat ini dipergunakan oleh karyawan untuk makan siang, tetapi sebagian besar perusahaan tidak menyediakannya, sehingga dapat dikatakan gizi kerja karyawan belum memadai.

B A B -III

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. TINJAUAN TENTANG PARTISIPASI

1. Pengertian dan Pentingnya Partisipasi.

Partisipasi sebenarnya merupakan istilah ilmu manajemen yang telah menjadi istilah umum dalam arti yang luas dan sering ditemukan dalam surat-surat kabar, majalah dan pidato-pidato para pemimpin bahkan dalam pergaulan sehari-hari.

Seorang pemimpin dalam melaksanakan tugasnya akan dapat lebih berhasil bilamana pimpinan tersebut mampu meningkatkan partisipasi bawahannya. Oleh karena itu setiap pemimpin dalam bidang apapun, mulai dari tingkat yang paling bawah hingga tingkat yang paling atas harus mampu meningkatkan partisipasi bawahannya. Sebab dengan demikian, maka berarti bawahannya akan diikutsertakan baik secara langsung maupun tidak langsung antara lain dalam pembuatan perencanaan serta pengambilan keputusan.

Dalam peningkatan partisipasi tersebut kita se-tidak-tidaknya harus mampu meningkatkan rasa harga diri, syukur apabila kita mampu menimbulkan rasa ikut memiliki. Bila kita berhasil demikian, maka kita akan dapat meningkatkan semangat dan kegairahan kerja serta rasa tanggung jawab bawahan kita.

sehingga keputusan-keputusan dan rencana yang kita lontarkan diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini karena mereka merasa ikut terlibat didalam pengambilan keputusan atau membuat perencanaan, sehingga mereka akan merasa ikut bertanggung jawab akan terlaksananya semua itu.

2. Cara Meningkatkan Partisipasi.

Untuk meningkatkan partisipasi bukan hanya melibatkan bawahan dalam proses pengambilan keputusan dan pembuatan perencanaan, tetapi masih banyak cara lain yang dapat dilakukan.

Alex S. Nitisemito, mengemukakan bahwa untuk meningkatkan partisipasi dapat dengan :

- "- Mengikutsertakan mereka secara langsung dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan.
- Menjelaskan tentang maksud tujuan keputusan dan perencanaan yang dikeluarkan.
- Meminta tanggapan dan saran tentang keputusan dan perencanaan yang akan dikeluarkan.
- Meminta informasi tentang segala sesuatu dari mereka dalam usaha membuat keputusan dan perencanaan" 5)

Dalam Sistem Kesehatan Nasional juga disebutkan bahwa :

5) Alex S Nitisemito : Manajemen Personalia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal 263.

" Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat perlu diciptakan iklim yang memungkinkan kemampuan masyarakat tumbuh dan berkembang. Untuk itu perlu komunikasi yang sehat antara ppeggem - bangan upaya kesehatan dengan masyarakat " 6).

3. Partisipasi dan Kedisiplinan.

Dengan adanya kedisiplinan maka keputusan dan perencanaan dapat dilaksanakan. Dengan demikian disiplin dan partisipasi harus seiring dan sejalan. Dengan dilandasi partisipasi mereka akan mempunyai kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi dibandingkan dengan yang dilandaskan kedisiplinan semata.

4. Ukuran Keberhasilan Partisipasi.

Suatu partisipasi dikatakan berhasil bilamana keputusan dan perencanaan tersebut dilaksanakan dengan sepenuh hati dan tanggung jawab. Mereka melaksanakan keputusan dan perencanaan tersebut karena mereka merasa dihargai, merasa diikutsertakan serta merasa memiliki. Dengan demikian akan dapat diharapkan bekerja dengan sepenuh hati meskipun pada saat itu kebetulan tidak ada pengawasan tingkat kesadaran yang tinggi.

6). Departemen Kesehatan Republik Indonesia : Sistem Kesehatan Nasional, Jakarta, 1982, hal 35.

jadi dengan demikian kita harus berusaha semaksimal mungkin dalam usaha peningkatan partisipasi sehingga timbul rasa ikut memiliki.

5. Keuntungan Lain Dengan Adanya Partisipasi.

- Diperoleh informasi yang berharga.
- Adanya tanggapan dan saran yang berharga.
- Memperkecil kesalahpahaman.

6. Penetapan Siapa yang Perlu Diajak Berpartisipasi.

Pada prinsipnya semua pihak perlu diajak berpartisipasi sebab dengan demikian diharapkan keputusan dan perencanaan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Meskipun demikian karena didasarkan pertimbangan ekonomis serta kepraktisan maka dapat menimbulkan partisipasi tidak dapat mengikutsertakan seluruhnya.

7. Efek samping dari Partisipasi.

Efek samping yang dapat ditimbulkan oleh partisipasi adalah :

- Ada beberapa pihak yang merasa dibebani pikirannya.
- Ada beberapa pihak menuntut imbalan atas keikutsertaannya mengambilan keputusan dan menentukan perencanaan
- Mereka yang menyesal bila sarannya tidak diterima.

B. TINJAUAN TENTANG PERUSAHAAN.

1. Pengertian Perusahaan Swasta.

Perusahaan adalah suatu badan atau organisasi yang menghimpun faktor-faktor produksi, alam, tenaga kerja, dan modal yang berdiri sendiri untuk memproduksi dan mencari laba.

Berbicara mengenai perusahaan, tidak terlepas dari pandangan industri, sebagai usaha untuk mengejar keuntungan, prestasi dan pendapatan yang besar. Industri biasanya menimbulkan pikiran kita tentang adanya pabrik, perusahaan-perusahaan yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi dengan menggunakan fasilitas seperti mesin-mesin. Jadi dapat dikatakan bahwa, industri adalah sekelompok perusahaan yang memproduksi barang yang sama dan untuk pasar yang sama pula.

Secara etimologis istilah swasta merupakan paduan dua kata, yaitu "swa" dan "sta" artinya sendiri dan berdiri. Dengan demikian swasta dapat diartikan, berdiri menurut kekuatan sendiri didalam memenuhi serta memecahkan permasalahan hidup. Sehingga perusahaan swasta dalam bidang industri dapat diartikan : sekelompok organisasi produksi untuk barang dan pasar yang sama, dengan menggunakan dan mengkoordinir sumber-sumber ekonomi untuk memuas -

kan kebutuhan hidup dengan cara yang menguntungkan serta berusaha memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah yang timbul menurut kekuatan sendiri.

Perusahaan dapat bertindak sebagai perantara antara sumber faktor produksi dan konsumen, meliputi sarana organisasi dan lembaga yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan produksi dan distribusi barang serta jasa untuk memuaskan kebutuhan konsumen.

Berdasarkan sifat cabang perusahaan, maka kegiatan perusahaan dapat dikelompokkan kedalam :

- a. Perusahaan yang bersifat pertanian.
- b. Perusahaan yang bersifat ekstraktif, perusahaan ini berusaha melepaskan barang yang terikat pada alam.
- c. Perusahaan yang bersifat perdagangan.
- d. Perusahaan yang bersifat industri.

2. Bentuk-bentuk Perusahaan.

Bentuk perusahaan yang ada dalam negara Indonesia adalah :

- a. Perusahaan perseroan.
- b. Perusahaan Persekutuan bentuk firma.
- c. Perusahaan persekutuan bentuk komanditer.
- d. Perusahaan perseroan terbatas.
- e. Koperasi.
- f. Perusahaan daerah dan Perusahaan negara.

3. Organisasi dan Pimpinan.

Organisasi adalah merupakan kerjasama dari beberapa orang untuk membentuk suatu wadah dan dengan wadah ini merupakan alat mencapai tujuan. Organisasi sangat erat hubungannya dengan pimpinan karena itu dalam organisasi harus ada yang memimpin.

Perusahaan-perusahaan sebagai unit terkecil dalam organisasi Kesehatan dan keselamatan kerja dalam praktek dan setiap perusahaan berbeda-beda karena tergantung jumlah buruh yang bekerja. Untuk perusahaan yang jumlah buruhnya puluhan ribu, sudah tentu perlu satu organisasi kesehatan dan keselamatan kerja yang lengkap, bahkan perlu dokter atau sekaligus dengan rumah sakit. Untuk perusahaan yang lebih kecil biasanya ada dokter part-time, yang memimpin poliklinik perusahaan dan tergantung dari kemampuan perusahaan untuk menyertakan keluarga dalam pemeliharaan kesehatan atau pengobatan penyakit. Untuk perusahaan yang lebih kecil lagi, yaitu jumlah pekerja kurang dari 50 orang, biasanya membuka poliklinik dengan dokter part-time tidaklah mungkin maka perlu kiranya dipikirkan satu pusat kesehatan industri, yang merupakan klinik gotong royong untuk beberapa perusahaan kecil.

Semboyan bahwa "Kesehatan dan Keselamatan"

Kerja harus dimulai dari atas ", menunjukkan secara tegas pentingnya peranan pimpinan atau pengawas kelompok tenaga kerja, ahli keselamatan dan staf lainnya, tidak akan berhasil apabila pimpinan perusahaan tidak mengambil tugas kepemimpinan dalam meninggikan dan mempertahankan standar keselamatan yang tinggi.

Pimpinan perusahaan tidaklah boleh sedikitpun memberikan keraguan kepada tenaga kerja tentang perhatian dan keterlibatannya dalam peristiwa kecelakaan. Pada suatu peristiwa kecelakaan, khususnya yang cukup berat, pimpinan perusahaan selain hanya melihat laporan kecelakaan juga harus memperoleh keterangan langsung dari korban, pimpinan regu atau kelompok, dan pengurus ditempat kerja atau bagian perusahaan. Dengan begitu, selain ia menunjukkan perhatian juga sekaligus menegaskan tanggung jawab pimpinan regu atau kelompok dan pimpinan bagian yang bersangkutan. Jika kecelakaan berat keterlibatan dan perhatian pimpinan perusahaan terhadap bantuannya pada korban harus pula terlihat pada pengaturan rumah sakit dan perhatian pada keluarga korban.

Mengingat pentingnya peran pimpinan perusahaan maka senantiasa harus diberikan penyuluhan tentang perundang-undangan Kesehatan dan keselamatan kerja.

C. TINJAUAN TENTANG KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Membicarakan masalah kesehatan kerja, kita tidak dapat melepaskannya dari Higene perusahaan, yang memiliki satu kesatuan pengertian sebagai terjemahan resmi dari "Occupational Health", yang cenderung diartikan sebagai lapangan kesehatan yang mengurus problematika kesehatan secara menyeluruh dari pada tenaga kerja, termasuk usaha-usaha kuratif, preventif, penyesuaian faktor manusia terhadap pekerjaannya dan higene dan lain-lain. Sedangkan kesehatan kerja sendiri adalah spesialisasi dalam ilmu kesehatan/kedokteran beserta prakteknya yang bertujuan, agar pekerja/masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik fisik atau mental, maupun sosial, dengan usaha-usaha preventif, dan kuratif, terhadap penyakit-penyakit/gangguan-gangguan kesehatan yang diakibatkan faktor-faktor pekerjaan dan lingkungan kerja serta terhadap penyakit-penyakit umum. Jadi sifat-sifat kesehatan kerja adalah : manusia sebagai sasaran dan bersifat medis.

Istilah Higene perusahaan dan kesehatan kerja termaktub secara resmi sehingga mempunyai kekuatan perundang-undangan, dalam Undang-undang No. 14, tahun 1964 tentang ketentuan pokok mengenai Tenaga Kerja (pasal 9 dan 10), dalam penjelasannya yang dimaksud dengan Higene Perusahaan dan Kesehatan Kerja adalah:

" Lapangan kesehatan yang ditujukan kepada pemeliharaan dan mempertinggi derajat kesehatan tenaga kerja, dilakukan dengan pengaturan pemberian pengobatan, perawatan tenaga kerja yang sakit, mengatur persediaan tempat, cara-cara dan syarat yang memenuhi norma-norma higene perusahaan dan kesehatan kerja untuk mencegah penyakit, baik sebagai akibat kerja, maupun penyakit umum serta menetapkan syarat-syarat kesehatan bagi perumahan tenaga kerja " 7)

Tujuan utama dari Higene Perusahaan dan Kesehatan Kerja adalah menciptakan tenaga kerja yang sehat dan produktif. Tujuan demikian mungkin dicapai karena terdapatnya korelasi diantara derajat kesehatan yang tinggi dengan produktifitas kerja atau perusahaan, yang didasarkan pada kenyataan-kenyataan sebagai berikut :

1. Untuk efisiensi kerja yang optimal dan sebaik-baiknya pekerjaan harus dilakukan dengan cara dan dalam lingkungan kerja yang memenuhi syarat-syarat kesehatan. Lingkungan dan cara dimaksud meliputi diantaranya, temperatur panas, penerangan ditempat kerja, debu di ruangan tempat kerja, mesin, pengekonomisan upaya. Cara dan lingkungan tersebut perlu disesuaikan pula dengan tingkat kesehatan dan keadaan gizi tenaga kerja yang bersangkutan.
2. Biaya dari kecelakaan dan penyakit-penyakit akibat kerja, serta penyakit umum yang meningkat jumlahnya karena pengaruh yang memburukkan keadaan oleh bahaya-bahaya yang ditimbulkan

7). Suma'mur, R.K : Higene Perusahaan dan Kesehatan kerja. edisi 4, Jakarta, 1984, hal.2.

oleh pekerjaan adalah sangat mahal seperti pengobatan, perawatan dirumah sakit, rehabilitasi, kerusakan mesin, peralatan dan bahan karena kecekakaan, terganggunya pekerjaan dan cacat yang menetap B)

Gangguan-gangguan pada kesehatan dan daya kerja akibat berbagai faktor dalam pekerjaan dapat dihindarkan, asal saja pekerja dan pimpinan perusahaan ada kemauan untuk mencegahnya. Tentu saja Perundang-undangan tidak ada manfaatnya bila pimpinan perusahaan tidak melaksanakannya, juga apabila para pekerja tidak mengambil peranan penting dalam menghindarkan gangguan-gangguan tersebut. Manusia dan beban kerja serta faktor-faktor dalam lingkungan kerja merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Hal ini tercermin dalam Sistem Kesehatan Nasional melalui peningkatan derajat kesehatan tenaga kerja :

1. Pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat pekerjaan.
2. Pembinaan lingkungan kerja yang memenuhi syarat-syarat kesehatan.
3. Penyelenggaraan upaya kesehatan tenaga kerja dan keluarganya secara menyeluruh.
4. Pembinaan tenaga kesehatan untuk meningkatkan kesehatan kerja.
5. Penyusunan, pembakuan dan pengaturan syarat-syarat kesehatan bagi tenaga kerja. 9).

B). Suma'mur, P.K : Higene Perusahaan dan Kesehatan Kerja, edisi 4, Jakarta, 1984, hal 3.

9). Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Sistem Kesehatan Nasional, Jakarta, 1982, hal 49.

Kesehatan kerja sangat berkaitan dengan perusahaan industri dan pengaruh industri terhadap kesehatan dapat digolongkan atas 2 golongan yaitu :

1. Pengaruhnya terhadap kesehatan dan keselamatan kerja.
2. Pengaruhnya terhadap kesehatan masyarakat yang berhubungan dengan masalah pencemaran lingkungan yang terdiri dari bahan-bahan buangan pabrik.

Secara umum Higene Perusahaan dan Kesehatan Kerja mempunyai program sebagai berikut :

1. Pemeliharaan lingkungan sehat.
2. Pemeriksaan kesehatan sebelum kerja.
3. Pemeriksaan kesehatan berkala.
4. Perlindungan terhadap bahaya-bahaya dari pekerjaan.
5. Imunisasi.
6. PPPK.
7. Pencatatan medis administrasi.
8. Penerangan dan pendidikan tentang kesehatan.
9. Pembinaan mental, fisik dan sosial.
10. Pencegahan pengotoran sekitarnya.
11. Hubungan luar dan kerja sama dalam kegiatan Higene Perusahaan dan Kesehatan Kerja.

Keselamatan kerja adalah keselamatan yang berkaitan dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahan, landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan. Dengan demikian keselamatan kerja bersasaran segala tempat kerja, baik di darat, udara, dalam tanah, dipermukaan dan dalam air. Juga menyangkut segenap aspek produksi dan distribusi, baik jasa maupun barang. Keselamatan kerja adalah tugas semua orang yang bekerja. Keselamatan kerja adalah dari, oleh dan untuk setiap tenaga kerja dan orang lainnya, bahkan masyarakat pada umumnya.

Adapun tujuan Keselamatan Kerja, adalah :

1. Melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktifitas nasional.
2. Menjamin keselamatan orang lain yang berada di tempat kerja.
3. Sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien. 10).

Keselamatan kerja erat-sangkutannya dengan peningkatan produksi dan produktifitas, -oleh karena itu tidak dapat disangkal bahwa keselamatan kerja memiliki latar belakang sosio-ekonomis dan kultural yang sangat luas dan turut menentukan derajat perkembangan nasional.

10). Suma'mur, F, K : Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan, edisi 1, Jakarta, 1957, hal.2.

B A B IV

KERANGKA KONSEPSIONAL

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan mempunyai ekor yang menyebabkan kehidupan manusia terancam oleh bermacam-macam benda, bahan dan lingkungan baru bagi kelanjutan hidupnya. Mengingat bahaya-bahaya atau resiko itu, maka dibentuklah suatu usaha kegiatan dalam rangka mengatasi hal tersebut. Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan disiplin ilmu yang mencoba mengatasi segala persoalan-persoalan, khususnya didalam dunia usaha, mengenai problem dari buruh perusahaan akibat faktor-faktor lingkungan perusahaan ataupun segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaannya.

Berbagai hal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan norma-norma Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang dalam hal ini termasuk : Pendidikan pimpinan dan karyawan, pengetahuan pimpinan dan karyawan, lamanya perusahaan beroperasi, jumlah karyawan, pelaksanaan undang-undang tentang Kesehatan dan Keselamatan kerja, jenis usaha produksi dan jenis peralatan yang dipakai.

1. Tingkat Pendidikan.

Pendidikan adalah proses belajar yang memberi

kemampuan pada seseorang untuk dapat berfikir secara objektif dan dapat menilai apakah kondisi disekelilingnya dapat diterima atau tidak, yang dapat mendorong perubahan sikap dan tingkah laku. Pada hakekatnya pendidikan merupakan upaya manusia untuk melestarikan hidupnya.

Lingkungan pendidikan mencakup lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat, dimana setiap lingkungan memberikan pengaruh pada proses pembentukan individu melalui pendidikan yang diterima.

2. Tingkat Pengetahuan Tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

Tingkat pengetahuan sedikit banyaknya berpengaruh terhadap diterima tidaknya suatu program. Pengetahuan yang berarti mengerti setelah melihat, menyaksikan, mengalami atau diajarkan, berarti pula bahwa apa yang telah diketahui dan mampu mengingatkan kembali sejak ia lahir sampai dewasa setelah mendapat pendidikan baik melalui pendidikan formal ataupun non formal.

Tingkat pengetahuan tentang kesehatan dan keselamatan kerja dari pimpinan perusahaan ataupun buruh sedikit banyaknya mempengaruhi penerimaan norma-norma kesehatan dan keselamatan kerja yang khususnya menyangkut pendayagunaan tenaga manusia seefektif mungkin, seefisien mungkin dan produktifitas kerja.

3. Lamanya Perusahaan Beroperasi.

Perusahaan yang sudah lama beroperasi (lebih dari 10 tahun) tentu saja mempunyai lebih banyak pengalaman khusus mengenai kesehatan dan keselamatan kerja, yang bila tidak mendapat perhatian memadai akan membawa suatu akibat bagi perusahaan itu sendiri. Sehingga dengan adanya pengalaman-pengalaman kerja itu, tentu pihak perusahaan akan berupaya untuk merencanakan pengeluaran dalam penanggulangan masalah kesehatan dan keselamatan kerja, melalui proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang terkoordinir. Dengan demikian diharapkan penerapan dan pelaksanaan norma-norma Kesehatan dan Keselamatan kerja di perusahaan ini, dapat terpenuhi sesuai yang diharapkan.

4. Jumlah Karyawan.

Jumlah karyawan sangat mempengaruhi bentuk organisasi suatu perusahaan ataupun syarat-syarat penyelenggaraan kegiatan dalam perusahaan. Seperti dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1977 bahwa perusahaan dengan jumlah buruh lebih 100 orang wajib ikut serta dalam Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK) dan ketentuan-ketentuan pengadaan fasilitas-fasilitas kesehatan bagi perusahaan, yang sesuai dengan jumlah buruh/karyawannya.

Semakin banyak jumlah karyawan atau buruh perusahaan, tentu semakin besar kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat kerja. Dari statistik menunjukkan bahwa 10 sampai 25 % tenaga kerja terlibat dalam 55 - 85 % dari seluruh kecelakaan.

Dengan demikian diharapkan pihak perusahaan dengan jumlah karyawan yang banyak akan dapat lebih cepat menerima dan melaksanakan kegiatan kesehatan dan keselamatan kerja, yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan tenaga kerja setinggi-tingginya agar daya produktifitasnya juga meningkat. Namun demikian tidak dapat dilupakan dampak yang ditimbulkan perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya.

5. Pelaksanaan Perundang-undangan tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

Pelaksanaan undang-undang tentang Kesehatan k kerja termaktub dalam UU No. 14 tahun 1969, dimana dijelaskan sasaran kesehatan kerja yang mencakup seluruh tenaga kerja disegala bidang, dan tujuan dari kesehatan kerja. Sedangkan untuk keselamatan kerja terdapat dalam UU No. 1 tahun 1970, yang menerangkan mengenai : Peristilahan, ruang lingkup, syarat-syarat keselamatan kerja, pengawasan dan pembinaan, panitia kesehatan dan keselamatan kerja, pelaporan kecelakaan kewajiban dan hak tenaga kerja, kewajiban bila mema...

suki ruang kerja, kewajiban pengurus dan ketentuan-ketentuan penutup.

Tingkat pelaksanaan undang-undang tersebut, bila dilaksanakan sebagaimana telah ditetapkan, maka dapat dikatakan kegiatan kesehatan dan keselamatan kerja akan berjalan sebagaimana mestinya, yang tentu saja dalam pelaksanaannya juga memperhatikan faktor-faktor lain yang mempengaruhinya.

6. Jenis Usaha Produksi dan Peralatan Yang dipakai.

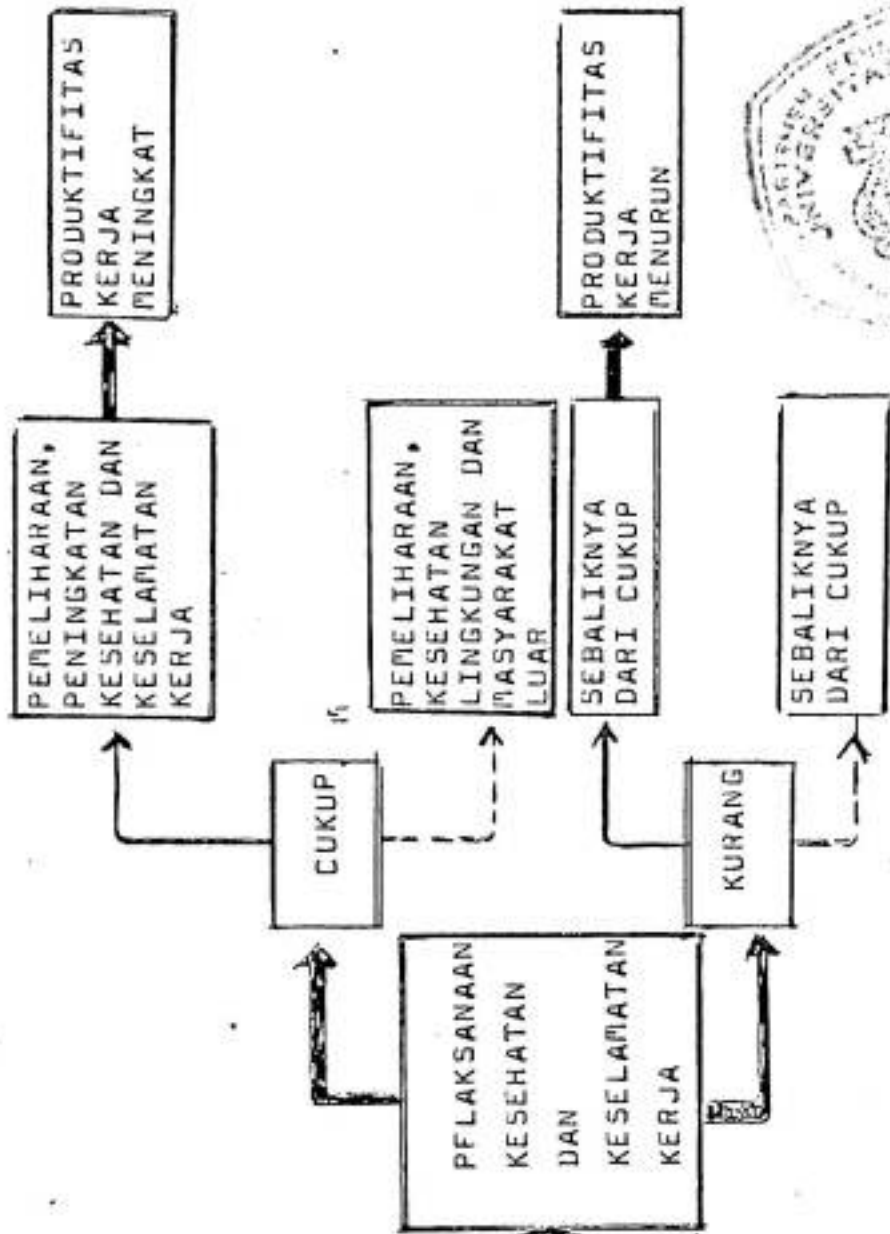
Salah satu yang mempengaruhi tingginya kecelakaan kerja yaitu : mesin-mesin atau peralatan yang tidak memenuhi syarat-syarat keselamatan, yang dihubungkan dengan jenis usaha produksi. Mesin-mesin ini dapat menimbulkan perubahan-perubahan lingkungan perusahaan, seperti : Kebisingan, ketidak nyamanan kerja oleh-karena suhu udara yang tinggi atau rendah, serta gas-gas yang dikeluarkan oleh mesin pada proses produksi.

Dengan adanya pengetahuan tentang segala sesuatu yang mungkin timbul akibat penggunaan teknologi ataupun pengalaman kerja yang dialami, khususnya dibidang kesehatan dan keselamatan kerja menyebabkan pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja dapat lebih mudah diterima. Dalam pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja seutuhnya memang banyak dipengaruhi berbagai

faktor termasuk juga hubungan yang harmonis antara badan yang berwenang dengan pimpinan perusahaan dan tenaga kerja, yang perlu dijalin demi usaha-usaha peningkatan kehidupan ekonomi untuk pembangunan bangsa dan negara Indonesia.

Keseluruhan kerangka konsep ini dapat dilihat dalam skema (halaman 32).

SKEMA KERANGKA KONSEP



- Pendidikan pimpinan dan karyawan perusahaan.
- Pengetahuan pimpinan tentang kesehatan dan keselamatan kerja.
- Lamanya perusahaan beroperasi.
- Pengetahuan karyawan tentang kesehatan dan keselamatan kerja.
- Pelaksanaan UU tentang kesehatan dan keselamatan kerja.
- Jumlah karyawan perusahaan.
- Jenis usaha produksi.
- Jenis peralatan yang dipakai.

Keterangan : - - - ; variabel yang tidak diteliti.

— ; variabel yang diteliti.

Penelitian ini dikhususkan pada perusahaan-perusahaan swasta tanpa menilai pengaruhnya pada lingkungan atau masyarakat luar perusahaan bila tidak / dilaksanakannya masalah kesehatan dan keselamatan kerja.



B A B V

M E T O D O L O G I

A. TAHAP PERSIAPAN

1. Penentuan judul.

Judul yang dipilih adalah : "STUDI TENTANG PARTISIPASI PERUSAHAAN SWASTA DALAM PELAKSANAAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA".

2. Bimbingan dan pengarahan dari staf dosen Laboratorium IKM / IKP Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin.

3. Tujuan survei.

Tujuan umum : untuk melihat gambaran tentang partisipasi perusahaan swasta dalam pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja.

Tujuan khusus :

- Menilai hubungan tingkat pengetahuan pimpinan perusahaan tentang kesehatan dan keselamatan kerja dengan pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja.
- Menilai hubungan besar kecilnya perusahaan dengan pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja.
- Menilai hubungan lamanya perusahaan beroperasi dengan pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja.

4. Penyusunan Hipotesis.

a. Hipotesis alternatif (H_1).

- Ada hubungan tingkat pengetahuan pimpinan perusahaan tentang kesehatan dan keselamatan kerja dengan pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja.
- Ada hubungan besar kecilnya perusahaan dengan pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja.
- Ada hubungan lamanya perusahaan beroperasi dengan pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja.

b. Hipotesis Nol (H_0).

- Tidak ada hubungan tingkat pengetahuan pimpinan perusahaan tentang kesehatan dan keselamatan kerja dengan pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja.
- Tidak ada hubungan besar kecilnya perusahaan dengan pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja.
- Tidak ada hubungan lamanya perusahaan beroperasi dengan pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja.

5. Penyusunan daftar pertanyaan responden.

6. Seminar dan diskusi.

B. TAHAP PERENCANAAN

1. Penyusunan definisi operasional dan kriteria objektif.
 - a. Perusahaan swasta adalah suatu organisasi yang menghimpun faktor-faktor produksi, alam, tenaga kerja yang berdiri dengan kekuatan sendiri dalam memenuhi dan memecahkan persoalannya untuk memproduksi dan mencari laba.
 - b. Partisipasi adalah pelaksanaan suatu program dengan baik atas dasar pengetahuan dan kesadaran pimpinan perusahaan tentang pentingnya program tersebut (dalam hal ini adalah Kesehatan dan Keselamatan Kerja).
 - c. Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Penilaian pelaksanaan ini ditetapkan beberapa kriteria yang terdiri atas :
 1. Melakukan pemeriksaan kesehatan awal terhadap tenaga kerja sebelum diterima.
 2. Mengadakan pemeriksaan kesehatan berkala. Sekurang-kurangnya sekali setahun pada seluruh tenaga kerja perusahaan.
 3. Mengadakan pendidikan / penerangan Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
Dikatakan melaksanakan bila sekurang-kurangnya melakukan kegiatan : penempelan poster, ceramah, diskusi dan latihan. Kegiatan lainnya bila memungkinkan seperti : Pemutaran film / sli

- de, pameran, perpustakaan dan perlombaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja antar perusahaan.
4. Menyediakan sarana Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan, berupa larutan yodium, kapas atau kasa steril. Lainnya adalah plester, verban dan alkohol.
 5. Menyediakan alat pelindung diri, dengan syarat utama yang harus dipenuhi yaitu : baju kerja, helm kaus tangan dan sepatu kerja. Sedangkan alat-alat lainnya disesuaikan dengan perusahaan yang bersangkutan, misalnya masker, pelindung telinga, kaca mata dan lain sebagainya.
 6. Menyediakan label / tanda / peringatan tertentu, dengan syarat ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat dan menggunakan tata cara penggunaan warna yang telah berlaku umum.
 7. Menyediakan poliklinik, dokter perusahaan / dokter yang ditunjuk / para medis atau dana untuk penyakit akibat kerja / kecelakaan kerja.
- Pada perusahaan yang jumlah karyawannya kurang atau sama dengan 50 orang sekurang-kurangnya mempunyai para medis full / part time pada klinik bergabung. Untuk perusahaan yang karyawannya lebih 50 orang sekurang-kurangnya mempunyai tenaga dokter part time untuk perusahaan.

Cara penilaiannya adalah :

- Cukup melaksanakan: Bila perusahaan melaksana

kan lebih atau sama dengan 4 kriteria, dengan ketentuan kriteria 3, 4 dan 5 harus ada.

- Kurang melaksanakan: Bila perusahaan hanya melaksanakan kurang atau sama dengan 3 kriteria diatas.

d. Pengetahuan pimpinan perusahaan tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

Dalam hal ini pengetahuan pimpinan dinilai berdasarkan jawaban yang diberikan pimpinan terhadap daftar pertanyaan yang diajukan.

- Pengetahuan cukup: bila responden memperoleh nilai lebih atau sama dengan 60 %.
- Pengetahuan kurang: bila responden memperoleh nilai kurang dari 60 %.

e. Besar-kecilnya perusahaan.

Hal ini dinilai berdasarkan jumlah karyawan yang bekerja pada perusahaan tersebut.

- Perusahaan besar: bila karyawannya lebih atau sama dengan 50 orang.
- Perusahaan kecil: bila karyawannya kurang dari 50 Orang.

d. Lamanya perusahaan beroperasi.

Dinilai dari waktu sejak mulainya perusahaan didirikan dan sampai sekarang masih memproduksi.

- Perusahaan lama: bila telah beroperasi lebih atau sama dengan 10 tahun.

- Perusahaan baru : bila perusahaan beroperasi be-
lum 10 tahun.

2. Metodologi Penelitian.

a. Metode penelitian : "Cross sectional study", yaitu penelitian untuk mempelajari hubungan antara faktor-faktor resiko dan efek, dengan model pendekatan observasi sekaligus pada satu saat.

b. Metode sampling : "Nonproporsional stratified random sampling", yaitu pengam-
bilan sampel dengan cara memba-
gi populasi menjadi beberapa
strata kemudian masing-masing
strata diambil tidak dengan
proporsi yang sama.

Populasi : Perusahaan-perusahaan swasta
dengan lokasi yang ditetapkan
oleh Lab. IKM / IKP Fakultas
Kedokteran UNHAS yaitu di Kota
Madya Ujung Pandang.

Sampel : Perusahaan industri swasta
yang terdaftar di Balai Hyper
kes dan Keselamatan Kerja Dep.
Tenaga Kerja Prop. Sul - Sel.

Responden : Pimpinan perusahaan atau yang
mewakilinya.

Yang dimaksud pimpinan perusahaan adalah pimpinan utama pada perusahaan perseorangan dan pimpinan produksi untuk perusahaan perseroan.

c. Metode pengambilan sampel.

- Lokasi : Ditentukan oleh lab. IKM / IKP Fak. Kedokteran Universitas Hasanuddin, yaitu Kotamadya Ujung Pandang.

- Perusahaan yang dipilih adalah perusahaan industri swasta yang melaksanakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan terdaftar di Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja Dep. Tenaga Kerja Propinsi Sulawesi Selatan, kemudian distratifikasikan menurut jenis produksi, yang terdiri dari :

1. Perusahaan industri tegel.
2. Perusahaan industri makanan.
3. Perusahaan industri minuman.
4. Perusahaan industri kayu.
5. Perusahaan industri coldstorage.
6. Perusahaan industri percetakan.

Pengambilan jumlah sampel dari setiap perusahaan dilakukan secara "Nonproporsional", yang dipilih secara random, dengan maksud agar setiap perusahaan dapat terwakili.

- Besarnya sampel; Diambil sesuai rumus :

$$n = \frac{Z^2 \times p \times q}{L^2}$$

Koreksinya :

$$n_f = \frac{n}{1 + \frac{n}{N}}$$

Keterangan : n = Estimasi besarnya sampel.

Z = Tingkat kepercayaan = 95 %.

p = Proporsi ciri tertentu.

q = 100 % - p.

L = derajat kemaknaan.

n_f = Ukuran sampel.

N = Populasi yang diteliti.

Dari data sekunder yang diperoleh dari Balai Hiper kes Dep. Tenaga Kerja Prop. Sulawesi Selatan:

- Jumlah perusahaan industri swasta yang melaksanakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan terdaftar = 162 perusahaan.
- Persentase perusahaan industri swasta yang melaksanakan kesehatan dan keselamatan kerja tidak diketahui sehingga dianggap = 50 %.

$$n = \frac{2,6896 \times 50 \% \times (100 \% - 50 \%)}{(0,1)^2} = 67,24$$

$$n_f = \frac{67,24}{1 + \frac{67,24}{162}} = 48$$

d. Metode pengumpulan data.

- Metode pengumpulan data : secara wawancara dipimpin dengan pedoman kuesioner yang telah disediakan.
- Teknik pengumpulan data : secara kunjungan ke tiap perusahaan dan melakukan observasi langsung.

Data primer : Diperoleh dari wawancara dengan pimpinan perusahaan atau yang mewakili.

Data sekunder : Diperoleh dari Balai Hiperkes, kantor masing-masing perusahaan atau dan instansi yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

e. Metode pengolahan data.

- Analisa secara deskriptif dengan cara manual dan kalkulator.
- Analisa hubungan antara variabel penelitian.

f. Metode pengujian hipotesa.

- Hipotesa yang diuji adalah hipotesa nol (H_0), dengan derajat kemaknaan = 0,1.
- Tes statistik dengan rumus :

$$Z = \frac{P_1 - P_2}{\sqrt{\frac{PQ}{N_1} + \frac{PQ}{N_2}}}$$

Keterangan :

- P_1 : Proporsi dari variabel I
 P_2 : Proporsi dari variabel II
 P : Proporsi dari kedua variabel
 Q : $100\% - P$
 N_1 : Jumlah sampel dari variabel I
 N_2 : Jumlah sampel dari variabel II

Kriteria pengujian adalah :

Pada tingkat kepercayaan 90 % dan $\alpha = 0,1$,

maka : H_0 ditolak jika nilai $Z =$

$$- 1,64 > Z \geq 1,64$$

Jadi H_0 ditolak bila $Z \geq 1,64$.

H_0 diterima bila $Z < 1,64$.

C. TAHAP PELAKSANAAN.

1. Sebelum melakukan survei pada lokasi yang telah ditentukan yaitu Kotamadya Ujung Pandang, terlebih dahulu melapor kepada :
 - Kepala kantor sosial politik Kotamadya tingkat II Ujung Pandang.
 - Kepala dinas kesehatan Kotamadya tingkat II Ujung Pandang.
 - Kepala kantor departemen tenaga kerja Kotamadya tingkat II Ujung Pandang.
 - Kepala balai hiperkes departemen tenaga kerja Prop. tingkat I Sulawesi Selatan.

2..Pengumpulan data.

a. Data primer.

Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan responden yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

b. Data sekunder.

- Datangtentang nama-nama dan alamat perusahaan industri swasta diperoleh dari Bala Hypeg kes dan Keselamatan Kerja Dep. Tenaga Kerja Propinsi Sulawesi Selatan.
- Data tentang struktur organisasi masing-masing perusahaan dan keadaan personalia dalam pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, diperoleh dari masing-masing perusahaan.

D. TAHAP PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA.

Data yang diperoleh dari hasil survai dikumpulkan dalam bentuk tabulasi data, kemudian diinput dalam tabel induk (lampiran 1 dan 2). Dari tabel induk ini, kemudian dibentuk tabel sesuai dengan tujuan penelitian untuk kemudian diolah dengan tes statistik.

Gambaran perincian hasil survai disusun sesuai tujuan penelitian, seperti tercantum dibawah ini :

a. Tingkat pengetahuan pimpinan perusahaan tentang kesehatan dan keselamatan kerja terhadap pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja.

- Pengetahuan cukup : 28 orang (58,33 %).
 - Cukup melaksanakan : 26 orang (92,86 %).
 - Kurang melaksanakan : 2 orang (7,14 %).
- Pengetahuan kurang : 20 orang (41,67 %).
 - Cukup melaksanakan : 7 orang (35,00 %).
 - Kurang melaksanakan : 13 orang (65,00 %).

b. Besar-kecilnya perusahaan terhadap pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja.

- Perusahaan besar : 17 perusahaan (35,42 %).
 - Cukup melaksanakan : 16 perusahaan (94,12 %).
 - Kurang melaksanakan : 1 perusahaan (5,88 %).
- Perusahaan kecil : 31 perusahaan (64,58 %).
 - Cukup melaksanakan : 17 perusahaan (54,84 %).
 - Kurang melaksanakan : 14 perusahaan (45,16 %).

c. Lamanya perusahaan beroperasi terhadap pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja.

- Perusahaan lama : 36 perusahaan (75,00 %).
 - Cukup melaksanakan : 29 perusahaan (80,56 %).
 - Kurang melaksanakan : 7 perusahaan (19,34 %).
- Perusahaan baru : 12 perusahaan (25,00 %).
 - Cukup melaksanakan : 4 perusahaan (33,33 %).
 - Kurang melaksanakan : 8 perusahaan (66,67 %).

TABEL 1

HUBUNGAN PENGETAHUAN PIMPINAN TENTANG
KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA DENGAN PELAKSANAANNYA
PADA PERUSAHAAN INDUSTRI SWASTA
DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG
DESEMBER 1989

PENGETAHUAN PIMPINAN PELAKSANAAN K3	CUKUP	KURANG	JUMLAH
C U K U P	26	7	33
K U R A N G	2	13	15
J U M L A H	28	20	48

Sumber : Data primer yang diolah.

Keterangan : K3 = Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

$$P_1 = 92,86\% \quad P = 67,75\% \quad N_1 = 28$$

$$P_2 = 35,00\% \quad Q = 31,25\% \quad N_2 = 20$$

Hasil tes statistik didapatkan :

$$Z = 4,26 > 1,64$$

Jadi H_1 diterima dan H_0 ditolak.

Kesimpulan : Pengetahuan pimpinan perusahaan mempunyai hubungan bermakna dengan pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

TABEL 2

- HUBUNGAN BESAR-KECILNYA PERUSAHAAN
DENGAN PELAKSANAAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
PADA PERUSAHAAN INDUSTRI SWASTA
DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG
DESEMBER 1989

BESAR-KECILNYA PERUSAHAAN PELAKSANAAN K3	BESAR	KECIL	JUMLAH
C U K U P	16	17	33
K U R A N G	1	14	15
J U M L A H	17	31	48

Sumber : Data primer yang diolah.

Keterangan : K3 = Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

$P_1 = 94,12\%$ $P = 68,75\%$ $N_1 = 17.$

$P_2 = 45,16\%$ $Q = 31,25\%$ $N_2 = 31.$

Hasil tes statistik didapatkan :

$$Z = 2,81 > 1,64$$

Jadi H_1 diterima dan H_0 ditolak.

Kesimpulan : Besar-kecilnya perusahaan mempunyai hubungan bermakna dengan pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

TABEL 3

HUBUNGAN LAMANYA PERUSAHAAN BEROPERASI
DENGAN PELAKSANAAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
PADA PERUSAHAAN INDUSTRI SWASTA
DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG
DESEMBER 1989

LAMANYA PERUSAHAAN BEROPERASI PELAKSANAAN K3	LAMA	BARU	JUMLAH
CUKUP	29	4	33
KURANG	7	8	15
JUMLAH	36	12	48

Sumber : Data primer yang diolah.

Keterangan : K3 = Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

$$P_1 = 80,56 \% \quad P = 68,75 \% \quad N_1 = 36$$

$$P_2 = 33,33 \% \quad Q = 31,25 \% \quad N_2 = 12$$

Hasil tes statistik didapatkan :

$$Z = 3,06 > 1.64$$

Jadi H_1 diterima dan H_0 ditolak.

Kesimpulan : Lamanya perusahaan beroperasi mempunyai hubungan bermakna dengan pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

TABEL 4

GAMBARAN PENGETAHUAN PIMPINAN TENTANG KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA DENGAN PELAKSANAANNYA PADA PERUSAHAAN INDUSTRI SWASTA BARU DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG DESEMBER 1989

PENGETAHUAN PIMPINAN PELAKSANAAN K3	CUKUP	KURANG	JUMLAH
C U K U P	3 25,0 %	1 8,3 %	4 33,3 %
K U R A N G	1 8,3 %	7 58,4 %	8 66,7 %
J U M L A H	4 33,3 %	8 66,7 %	12 100 %

Sumber : Data primer yang diolah.

Keterangan : K3 = Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

Dari tabel diatas dapat diasumsikan bahwa :
 Pada 12 Perusahaan industri swasta baru di Kotamadya Ujung Pandang, 7 perusahaan (58,4 %) diantaranya, kurang melaksanakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja di pimpin oleh pimpinan yang memiliki pengetahuan kurang tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

TABEL 5

GAMBARAN PENGETAHUAN PIMPINAN TENTANG KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA DENGAN PELAKSANAANNYA PADA PERUSAHAAN INDUSTRI SWASTA KECIL DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG DESEMBER 1989

PENGETAHUAN PIMPINAN PELAKSANAAN K3	CUKUP	KURANG	JUMLAH
C U K U P	14 45,7 %	2 6,5 %	16 52,2 %
K U R A N G	3 9,7 %	12 38,1 %	15 47,8 %
J U M L A H	17 55,4 %	14 44,6 %	31 100 %

Sumber : Data primer yang diolah.

Keterangan : K3 = Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

Dari tabel diatas dapat diasumsikan bahwa :
 Pada 31 perusahaan industri swasta kecil di Kotamadya Ujung Pandang, 12 perusahaan (38,7 %) diantaranya kurang melaksanakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja di pimpin oleh pimpinan yang memiliki pengetahuan kurang tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

TABEL 6

GAMBARAN PENGETAHUAN PIMPINAN TENTANG KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA DENGAN PELAKSANAANYA PADA PERUSAHAAN INDUSTRI SWASTA LAMA DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG DESEMBER 1989

PENGETAHUAN PIMPINAN PELAKSANAAN K3	CUKUP	KURANG	JUMLAH
C U K U P	23 67,9 %	1 2,7 %	24 66,6 %
J U R A N G	6 16,7 %	6 16,7 %	12 33,4 %
J U M L A H	29 80,6 %	7 19,4 %	36 100 %

Sumber . . . : Data primer yang diolah

Keterangan : K3 = Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

Dari tabel diatas dapat diasumsikan bahwa :

Pada 36 Perusahaan industri swasta lama di Kotamadya Ujung Pandang, 23 perusahaan (67,9 %) diantaranya, cukup melaksanakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja dipimpin oleh pimpinan yang memiliki pengetahuan cukup tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

TABEL 7

GAMBARAN PENGETAHUAN PIMPINAN TENTANG KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA DENGAN PELAKSANAANNYA PADA PERUSAHAAN INDUSTRI SWASTA BESAR DI KOTAMADYA UJUNG PANGANG DESEMBER 1989

PENGETAHUAN PIMPINAN PELAKSANAAN K3	CUKUP	KURANG	JUMLAH
C U K U P	12 70,6 %	0 0 %	12 70,6 %
K U R A N G	4 23,5 %	1 5,9 %	5 29,4 %
J U M L A H	16 94,1 %	1 5,9 %	17 100 %

Sumber : Data primer yang diolah.

Keterangan : K3 = Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

Dari tabel diatas dapat diasumsikan bahwa :
 Pada 17 perusahaan industri swasta besar di Kotamadya Ujung Pandang, terdapat 12 perusahaan (70,6 %) cukup melaksanakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja dipimpin oleh pimpinan yang memiliki pengetahuan cukup tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

B A B VI

PEMBAHASAN HASIL DAN MASALAH YANG DITEMUKAN

A. PEMBAHASAN HASIL.

1. Hubungan pengetahuan pimpinan perusahaan tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja dengan pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil survai, ternyata dari 48 perusahaan ditemukan 28 pimpinan perusahaan memiliki pengetahuan cukup tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (58,33 %), 26 perusahaan diantaranya (92,86 %) cukup melaksanakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Adapun 20 perusahaan yang pimpinannya memiliki pengetahuan kurang tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja, 7 perusahaan diantaranya (35,00 %) cukup melaksanakan dan 13 lainnya kurang melaksanakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

Hasil tes statistik disimpulkan bahwa : Ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan pimpinan tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja dengan pelaksanaannya. Ini berarti bahwa semakin cukup pengetahuan pimpinan, semakin cukup pula pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja itu.

Hal ini disebabkan karena dengan pengetahuan pimpinan yang cukup, memungkinkan seorang pemimpin dapat menentukan kebijaksanaan terhadap karyawan dalam meningkatkan partisipasinya untuk

mempertinggi produktifitas, kesehatan dan kesejahteraan karyawannya.

2. Hubungan besar-kecilnya perusahaan dengan pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

Berdasarkan hasil survai, ternyata dari 48 perusahaan ditemukan 17 perusahaan besar (35,42%) 16 perusahaan diantaranya cukup melaksanakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (94,12%). Sedangkan 31 perusahaan kecil (64,58%), terdapat 17 perusahaan (54,84%) cukup melaksanakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, sedangkan 14 perusahaan lainnya (45,16%) kurang melaksanakan.

Hasil tes statistik disimpulkan bahwa : Ada hubungan bermakna antara besar-kecilnya perusahaan dengan pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Ini berarti bahwa perusahaan besar, cukup melaksanakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

Hal ini disebabkan karena pada perusahaan besar mempunyai :

- Pimpinan yang memiliki pengetahuan cukup tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
- Cukup biaya untuk pengadaan sarana Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
- Anggapan bahwa dengan semakin banyaknya tenaga kerja, maka kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat kerja semakin banyak pula.

3. Hubungan lamanya perusahaan beroperasi dengan pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

Berdasarkan hasil survei, ternyata dari 48 perusahaan terdapat 36 perusahaan lama (75,0 %) dan 29 perusahaan diantaranya (80,56 %) cukup melaksanakan, 7 perusahaan lainnya (19,34 %) kurang melaksanakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Sedangkan 12 perusahaan baru (25,0 %), 4 perusahaan cukup melaksanakan dan 8 perusahaan kurang melaksanakan (33,33 % dan 66,67 %) Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

Hasil tes statistik disimpulkan bahwa: Ada hubungan bermakna antara lamanya perusahaan beroperasi dengan pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Ini berarti bahwa Perusahaan lama melaksanakan cukup Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

Hal ini disebabkan karena pada perusahaan lama mempunyai :

- Pimpinan yang memiliki pengetahuan tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
- Pengalaman yang lebih banyak tentang akibat dan manfaat pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
- Cukup biaya pengadaan sarana Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

4. Gambaran peranan pengetahuan pimpinan perusahaan tentang pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada tiap-tiap jenis perusahaan.

Berdasarkan hasil survei, dapat diambil asumsi peranan pengetahuan pimpinan terhadap pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada tiap-tiap jenis perusahaan, sebagai berikut:

- a. 58,4% perusahaan industri swasta baru di Kotamadya Ujung Pandang, kurang melaksanakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja dipimpin oleh pimpinan yang memiliki pengetahuan kurang.
- b. 38,7 % perusahaan industri swasta kecil di Kotamadya Ujung Pandang kurang melaksanakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, dipimpin oleh pimpinan yang memiliki pengetahuan kurang.
- c. 63,99% perusahaan industri swasta lama di Kotamadya Ujung Pandang cukup melaksanakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, dipimpin oleh pimpinan yang memiliki pengetahuan cukup.
- d. 70,6 % perusahaan industri swasta besar di Kotamadya Ujung Pandang cukup melaksanakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, dipimpin oleh pimpinan yang memiliki pengetahuan cukup.

Berdasarkan keempat asumsi diatas, maka dapat diperoleh satu kesimpulan asumsi yaitu bahwa ; pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada perusahaan industri swasta di Kota madya Ujung-Pandang, sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan pimpinan perusahaan tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

B. MASALAH YANG DITEMUKAN

Dalam uraian ini akan ditinjau, penyebab kurangnya pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, pada perusahaan industri swasta di Kotamadya Ujung Pandang, yang sempat ditemukan dalam melakukan survei. Faktor-faktor penyebab kurangnya pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja tersebut adalah :

1. Kurangnya pengetahuan pimpinan perusahaan tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

Hal ini terjadi karena kurang aktifnya pimpinan perusahaan dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Sebagai contoh, banyak kegiatan (seperti ceramah, penataran) diperuntukkan pimpinan perusahaan yang diadakan oleh instansi terkait, khususnya Balai Hyperkes dan Keselamatan-Kerja, ternyata dilimpahkan kepada bawahannya, sehingga pimpinan akan kesulitan menentukan kebijaksanaan pelaksanaannya dalam perusahaan yang dipimpinnya.

Penyebab lain adalah sikap pimpinan yang lebih banyak memikirkan dan melaksanakan kegiatan peningkatan produksi dari pada memikirkan keselamatan dan kesehatan karyawannya.

2. Kurangnya pengetahuan karyawan tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

Hal ini mengakibatkan karyawan tidak menuntut banyak upaya pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, sebab karyawan tidak mengetahui manfaat dan akibat-akibat yang dapat terjadi dari kurangnya pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

3. Biaya pengadaan sarana pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

Persoalan ini nampaknya banyak dihadapi oleh perusahaan baru dan perusahaan kecil, yang hanya memiliki modal usaha sedikit.

4. Status karyawan.

Sebahagian besar karyawan pada perusahaan industri swasta di Ujung Pandang merupakan buruh lepas, keadaan ini menyebabkan perusahaan akan merasa rugi bila melaksanakan Kesehatan dan Keselamatan kerja khususnya dalam hal pemeriksaan kesehatan baik awal ataupun berkala.

5. Masih rendahnya pengawasan dari instansi yang berwenang.

Hal ini ditunjukkan dari sikap pelaksanaan per

sahaan, yang umumnya melaksanakan bila mendapat kunjungan dari pihak yang berwenang khususnya dari Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja. Sedangkan kunjungan perusahaan itu masih kurang dilakukan, walaupun dilaksanakan umumnya terbatas pada kunjungan semata jarang melakukan evaluasi dan penegasan untuk melaksanakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada perusahaan itu.

Demikianlah penyebab kurangnya pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada perusahaan industri swasta di Ujung Pandang, dan menurut gambaran data yang ditemukan selama survai dapat dikatakan bahwa faktor yang paling berpengaruh adalah rendahnya pengetahuan pimpinan perusahaan tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

B A B VII
D I S K U S I



Kesehatan dan Keselamatan Kerja, merupakan suatu program yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, kesejahteraan dan produktifitas tenaga kerja. Melihat peranannya yang penting itu, pemerintah telah membuat perundang-undangan untuk pelaksanaannya. Lahirlah UU No.14 tahun 1969, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan dan UU No. 1 tahun 1970 tentang Norma-norma Keselamatan Kerja. Oleh karena itu, perusahaan sebagai unit pelaksana, harus melaksanakan dengan baik program ini. Tetapi kenyataannya tidaklah demikian. Seperti yang terungkap dalam hasil survai ini, pada perusahaan swastaindustri di Kotamadya Ujung Pandang.

Hasil survai menunjukkan bahwa belum semua perusahaan industri swasta cukup melaksanakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, terbukti dari 48 perusahaan yang disurvei, hanya 33 perusahaan (68,75 %) yang cukup melaksanakan. Dan hasil tes statistik menunjukkan bahwa ketiga variabel yang diteliti yaitu pengetahuan pimpinan tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja, besar-kecilnya perusahaan dan lamanya perusahaan beroperasi mempunyai hubungan yang bermakna dengan pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada perusahaan. Disamping itu dari hasil diskripsi data, dapat diasumsikan bahwa variabel yang paling berperan dalam pelaksanaan ini adalah

variabel pengetahuan pimpinan.

Hal ini membuktikan bahwa pengetahuan sebagai salah satu komponen perilaku tidak dapat diragukan lagi. Dan perilaku seorang pimpinan perusahaan sangat menentukan pelaksanaan suatu program dalam perusahaan. Oleh karena itu, seorang pimpinan akan kesulitan menentukan kebijaksanaan dalam perusahaannya apabila tidak mengetahui manfaat dan akibat dari penentuan kebijaksanaan itu. Maka tepatlah penggunaan makna semboyan Bahwa Kesehatan dan Keselamatan Kerja harus dimulai dari atas, sebab persoalan ini adalah merupakan salah satu program wajib bagi setiap perusahaan dalam melakukan operasi dan kegiatannya demi meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan serta produktifitas tenaga kerja, untuk selanjutnya meningkatkan produksi perusahaan dan memperoleh keuntungan yang lebih banyak.

Bertolak dari kenyataan ini pula, dapatlah ditetapkan satu langkah penanggulangan kurangnya pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja ini di perusahaan swasta, yaitu melakukan upaya peningkatan pengetahuan pimpinan tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja, apakah itu dalam bentuk penataran, ceramah atau pendidikan dan latihan dengan nara sumber dari pakar bidang keilmuan yang terkait misalnya Hyperkes dan Keselamatan Kerja, dengan memberi penegasan terhadap keikutsertaan para pimpinan perusahaan, tidak dengan melimpahkan kepada bawahannya.

Sehingga dengan pengetahuan yang dimilikinya, diharapkan timbul sikap, perbuatan dan perilaku yang baik untuk mewujudkan pelaksanaan yang baik. Disamping itu dengan pengetahuan yang cukup, seorang pimpinan dapat menjadi sumber informasi bagi karyawan sehingga terjadi penyebaran pengetahuan dalam usaha memasyarakatkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja ini, karena persoalan ini dianggap sebagai suatu kebutuhan pokok oleh karyawan.

Langkah-langkah lain yang dapat dilaksanakan berdasarkan penyebab timbulnya masalah yang ditemukan selama melakukan survei adalah : Membentuk semacam klinik bersama, yang diharapkan dapat menjalankan atau melaksanakan norma-norma Kesehatan dan Keselamatan Kerja, dan dibentuk oleh sekumpulan perusahaan yang bermodal usaha kecil atau yang merasa belum mampu untuk mengadakan sarana sendiri untuk perusahaannya, sehingga dengan biaya yang kecil dapat menciptakan pelaksanaan yang baik. Dan akan lebih baik lagi bila klinik bersama ini dibentuk oleh kumpulan perusahaan dengan jenis usaha yang sama, sehingga petugas Kesehatan dan Keselamatan Kerja dapat lebih spesifikasi dalam menangani kasus-kasus yang timbul pada tiap jenis perusahaan. Selain itu, tidak dapat disepelekan peranan instansi-instansi yang terkait untuk lebih intensif dalam melakukan pengawasan dan harus tegas dalam memberikan anjuran pelaksanaan, sehingga tidak timbul lagi kesan bahwa perusahaan hanya melaksanakan bila mendapat kunjungan tetapi setelah kunjungan pelaksanaan selesai.

B A B VIII

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil survai yang didapatkan pada perusahaan industri swasta di Kotamadya Ujung Pandang, tentang partisipasinya dalam melaksanakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, khususnya melihat hubungan antara pengetahuan pimpinan tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja, besar-kecilnya perusahaan dan lamanya perusahaan beroperasi dengan pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, maka dapat ditarik kesimpulan dan menyarankan sebagai berikut :

A. KESIMPULAN

1. Perusahaan industri swasta di Kotamadya Ujung Pandang yang cukup melaksanakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja hanya 68,75 %.
2. Pengetahuan pimpinan tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Besar-kecilnya perusahaan dan lamanya perusahaan beroperasi mempunyai hubungan yang bermakna dengan pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
3. Variabel yang dianggap memegang peranan penting dalam pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja adalah pengetahuan pimpinan tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

B. SARAN - SARAN

1. Perlu dilakukan upaya peningkatan pengetahuan tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja, khususnya kepada pimpinan perusahaan baik berupa ceramah, kursus atau pendidikan dan latihan dengan menampilkan nara sumber pakar bidang ilmu yang terkait misalnya Hyperkes dan Keselamatan Kerja.
2. Perlu dibentuk suatu wadah pelaksana Kesehatan dan Keselamatan Kerja berupa klinik bersama yang dibentuk oleh sekelompok perusahaan, dan lebih baik lagi bila disesuaikan dengan jenis produksi perusahaan tersebut, misalnya klinik bersama untuk perusahaan makanan, minuman, tegel dan sebagainya sehingga pengelolanya dapat lebih mengkhususkan diri untuk mengnggulagi dan mengevaluasi kasus-kasus yang timbul pada tiap jenis produksi.
3. Perlunya pengawasan dan evaluasi yang lebih intensif dari instansi-instansi yang berwenang, khususnya Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja. Dan perlu kerja sama antar departemen yang terkait, misalnya penerbitan izin pengoperasian suatu pabrik harus mendapat rekomendasi pnbadaan atau pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

DAFTAR PUSTAKA

1. Abadi, E.S : Pedoman pemeriksaan terhadap berbagai bahaya di lingkungan kerja. Majalah Kesehatan Masyarakat Indonesia, Tahun XV, No.4, November 1984 hal. 201-11.
2. Departemen Kesehatan Republik Indonesia : Sistem Kesehatan Nasional, Jakarta, 1982 hal. 35-40.
3. Halim Ridwan : Perihal ASTEK. Hukum perburuhanda lam tanya jawab. Ghalia Indonesia, 1978, hal. 106-17.
4. Manulang, M : Pengantar ekonomi perusahaan. edisi VII, Ghalia Indonesia, 1980, hal. 17-41.
5. Nitisemito, A.S : Partisipasi dalam Menejemen persobalia, Ghalia Indonesia, 1984, hal. 260-73.
6. Ngatimin, H.M. Rusli : Metode penelitian. Diktat kuliah Fakultas Kedokteran UNHAS, Ujung Pandang.
7. Ngatimin, H.M. Rusli : Higene perusahaan dan Kesehatan kerja, Diktat kuliah Fakultas Kedokteran Unhas. Ujung Pandang.
8. Praktiknya, A.W : Dasar-dasar metodologi penelitian kedokteran dan kesehatan. C.V Rajawali, Jakarta, 1986.
9. Suma'mur, P.K. : Keselamatan kerja dan pencegahan kecelakaan, edisi I, Jakarta, 1981.
10. Suma'mur, P.K. : Higene perusahaan dan kesehatan kerja, edisi V, Jakarta, 1986.
11. Suma'mur, P.K. : Pengaruh lingkungan pekerjaan terhadap kesehatan. Majalah kesehatan Masyarakat, Tahun V, No.15, 1977, hal. 9-17.
12. Singarimbun, M : Metode penelitian survei. Lembaga penelitian pendidikan dan penerangan Ekonomi sosial, Jakarta, 1982.

TABULASI DATA PRIMER HASIL SURVAI PADA
PERUSAHAAN INDUSTRI SWASTA DI KOTAMADYA
UJUNG PANDANG, DESEMBER 1989.

NO. RESP	PENGETAHUAN PIMPINAN TENTANG K ₃		BESAR KECILNYA PERUSAHAAN		LAMANYA PERUSAHAAN BEROPERASI		PELAKSANAAN K ₃	
	CKP	KRG	B	K	BR	LM	CKP	KRG
1.		+		+	+			+
2.		+		+		+		+
3.	+			+		+	+	
4.		+		+		+		+
5.	+		+			+	+	
6.	+		+			+	+	
7.	+			+	*		+	
8.		+	+			+	+	
9.		+		+		+		+
10.	+		+			+	+	
11.	+		+			+	+	
12.		+	+			+	+	
13.	+			+	+		+	
14.		+		+		+		+
15.		+		+		+		+
16.	+		+			+	+	
17.	+			+		+	+	
18.	+		+			+	+	
19.	+			+		+	+	
20.	+			+		+	+	
21.	+			+		+	+	

22.		+		+		+	+	
23.	+			+		+	+	
24.	+			+		+	+	
25.	+			+	+			+
26.	+		+			+		+
27.	+			+		+	+	
28.	+			+		+	+	
29.	+		+			+	+	
30.		+		+	+			+
31.	+			+	+		+	
32.		+		+	+			+
33.	+		+			+	+	
34.		+		+		+	+	
35.		+		+	+			+
36.		+	+			+		+
37.		+		+	+			+
38.	+		+			+	+	
39.	+		+			+	+	
40.	+			+		+	+	
41.	+			+		+	+	
42.		+	+			+	+	
43.		+	+			+	+	
44.	+			+		+	+	
45.	+		+			+	+	
46.		+		+	+		+	
47.		+		+	+			+
48.		+		+	+			+

Keterangan : CKP = Cukup BR* Baru B = Besar
 KRG = Kurang LF = Lama K * Kecil

Tabel 8. JUMLAH DAN PROSENTASE RESPONDEN DIPERINCI MENURUT TINGKAT PELAKSANAAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA TERHADAP VENIS VARIABEL PADA PERUSAHAAN INDUSTRI SWASTA DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG, DESEMBER 1989.

V A R I A B E L		PELAKSANAAN K3		JUMLAH
		Cukup me- laksanakan	Kurang me- laksanakan	
TINGKAT PENGTAH- HUAN PIMPINAN PERUSAHAAN TENTANG K3	C	26 (92,86 %)	2 (7,14 %)	28 (58,33 %)
	K	7 (35,00 %)	13 (65,00 %)	20 (41,67 %)
	J	33 (68,75 %)	15 (31,25 %)	48 (100,0 %)
BESAR- KECILNYA PERUSAHAAN	A	16 (94,12 %)	1 (5,88 %)	17 (35,42 %)
	B	17 (54,84 %)	14 (45,16 %)	31 (64,58 %)
	J	33 (68,75 %)	15 (31,25 %)	48 (100,0 %)
LAMANYA PERUSAHAAN BEROPERASI	C	29 (80,56 %)	7 (19,34 %)	36 (75,00 %)
	D	4 (33,33 %)	8 (66,67 %)	12 (25,00 %)
	J	33 (68,75 %)	15 (31,25 %)	48 (100,0 %)

Sumber : data primer yang diolah.

Keterangan : K3 = Kesehatan dan keselamatan kerja.

C = Cukup. K = Kurang.

A = Perusahaan besar. J = Jumlah

B = Perusahaan kecil.

C = Perusahaan lama.

D = Perusahaan baru.

LABORATORIUM IKM DAN IKP
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNHAS
 UNIVERSITAS HASANUDDIN

DAFTAR PERTANYAAN

Nomor responden :
 Tanggal wawancara :
 Nama perusahaan :
 Alamat perusahaan :
 Jenis usaha produksi :
 Tahun mulai produksi :

Nama lengkap responden :
 U m u r : tahun
 Suku / bangsa : /
 A g a m a :
 Pendidikan :
 Jabatan :

A. PENGETAHUAN PIMPINAN TENTANG KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA.

1. Menurut Bapak, apa yang dimaksud dengan Kesehatan Kerja ?
 - a. Lapangan kesehatan yang mengurus problematika kesehatan secara menyeluruh dari tenaga kerja.
 - b. Bidang kesehatan yang bertujuan memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan tenaga kerja dan masyarakat sekitarnya.
 - c. Sebagai alat untuk mencapai derajat kesehatan tenaga kerja dalam aspek pencegahan, pengobatan, serta mempertinggi efisiensi dan produktivitas tenaga kerja.
 - d. Spesialisasi dalam ilmu kesehatan beserta praktiknya

yang bertujuan agar pekerja/masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik fisik, mental, maupun sosial.

2. Keselamatan Kerja menurut Bapak adalah :

- a. Keselamatan yang bertalian dengan segala alat dan proses pekerjaan.
- b. Keselamatan yang bertalian dengan segala tempat kerja.
- c. Keselamatan dengan sasaran pekerja dan masyarakat.
- d. Keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan dan lingkungan kerja serta cara melakukannya.

3. Bagaimana pendapat Bapak mengenai masa depan Kesehatan dan Keselamatan Kerja ?

- a. Masa depannya cerah.
- b. Cerah karena sesuai dengan kemajuan teknologi.
- c. Cerah karena lapangan kesehatan dan keselamatan kerja semakin luas sesuai pertambahan dan perkembangan jumlah industri dan proses industrialisasi.
- d. Cerah karena industri dan proses industrialisasi adalah syarat mutlak perkembangan suatu bangsa/negara.

4. Menurut Bapak, siapa seharusnya yang terlibat dalam program kesehatan dan keselamatan kerja ?

- a. Pimpinan perusahaan dan karyawannya.
- b. Dari dan untuk tenaga kerja serta orang lainnya.
- c. Dari, oleh dan untuk tenaga kerja serta orang lainnya
- d. Dari, oleh dan untuk tiap tenaga kerja serta orang lain dan juga masyarakat pada umumnya.

5. Menurut Bapak, apa tujuan kesehatan kerja ?
- Melindungi tenaga kerja atas hak dan kewajibannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produktivitas nasional.
 - Menjamin keselamatan orang lain yang berada di tempat kerja dan melindungi sumber produksi.
 - Melindungi tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya, menjamin kesehatan dan keselamatan orang lain yang berada di tempat kerja serta melindungi sumber produksi.
 - Melindungi hak dan kewajiban tenaga kerja dalam melaksanakan pekerjaannya, menjamin keselamatan orang lain yang berada di tempat kerja dan pemeliharaan sumber produksi secara aman dan efisien.
6. Menurut Bapak, kesehatan kerja itu bersifat :
- Pengobatan.
 - Medis.
 - Pengobatan dan sasarannya adalah manusia.
 - Medis dan sasarannya adalah manusia.
7. Apa yang Bapak ketahui tentang UU No. 14 / 1969 ?
- UU ketenagakerjaan.
 - UU tentang higiene perusahaan dan kesehatan kerja.
 - UU tentang pelaksanaan ketenagakerjaan dalam segala segi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan tenaga kerja.
 - UU tentang ketenagakerjaan yang bertujuan meningkat-

kan kesehatan dan produktivitas kerja.

8. Sejauh mana Bapak tahu tentang UU No. 1 tahun 1970 ?
 - a. UU tentang keselamatan kerja.
 - b. UU yang dibuat untuk melihat perkembangan proses industrialisasi di Indonesia.
 - c. UU tentang keselamatan kerja yang lebih ditujukan kepada tujuan pencegahan.
 - d. UU yang ruang lingkupnya adalah keselamatan kerja dalam segala tempat kerja dalam wilayah kesatuan RI.
9. Tahukah Bapak, mengapa Keluarga Berencana diterapkan pada tenaga kerja wanita yang telah berkeluarga ?
 - a. Agar pembinaan keluarga dan kegairahan kerja lebih dapat terlaksana.
 - b. Agar tenaga kerja wanita mampu menerima tugas/pekerjaan sesuai kemampuannya.
 - c. Karena dapat lebih menjamin keadaan fisik, mental dan karier kerja yang lebih baik.
 - d. Karena dengan ber-KB tenaga kerja wanita dapat lebih berdedikasi dan lebih produktif.
10. Menurut Bapak, bagaimana peranan-pimpinan perusahaan dalam pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja ?
 - a. Pimpinan perusahaan sebagai penentu dalam pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja di perusahaan.
 - b. Pengaruh pimpinan harus nyata dalam setiap kegiatan kesehatan dan keselamatan kerja, di mana ia sebagai pimpinan utama dalam kegiatan tersebut.

a. Ya

b. Tidak

Bila ya, sarana pemeriksaan apa saja ?

a. Poliklinik

b. Dokter perusahaan

c. Dokter yang ditunjuk

d. Paramedis

e. Dana untuk penyakit dan kecelakaan kerja

f.

13. Apakah karyawan di perusahaan ini mengikuti Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK) ?

a. Ya

b. Tidak

Kalau ya, kira-kira berapa persen dari seluruh karyawan ?

a. 25 %

b. 50 %

c. 75 %

d.

C. TENTANG JUMLAH KARYAWAN

19. Berapa jumlah karyawan yang bekerja di perusahaan Bapak?

a. Kurang dari 50 orang

b. Sekitar 50 - 99 orang

c. Sekitar 100 - 199 orang

d. Lebih atau sama dengan 200 orang.

D. TENTANG LAMANYA PERUSAHAAN BEROPERASI

20. Sudah berapa lama perusahaan ini beroperasi ?

a. Kurang dari 10 tahun

b. Lebih atau sama dengan 10 tahun.

Lampiran 2.

NAMA DAN ALAMAT PERUSAHAAN YANG DIAMBIL SEBAGAI SAMPEL.

No Resp	Nama Perusahaan	Alamat
1.	P. Tegel Arham	Jl. Anuang 163
2.	P. Tegel Rachmat	Jl. P.Tendean J.270
3.	P. Tegel Smeru	Jl. G.Tinggimae 41
4.	P. Tegel Massa	Jl. G.Merapi 87
5.	P. Tegel Utama Raya	Jl. Pongtiku I/9
6.	P. Tegel Nusantara	Jl. Nusantara 404
7.	P. Tegel Batu Baja	Jl. G.Bawakaraeng 240
8.	P. Biskuit Ciwangi	Jl. G.Latimojong 129 B
9.	P. Biskuit Selecta	Jl. G.Latimojong 129 A
10.	PT. Pyramid Megah Sakti	Jl. Irian 280-288
11.	P. Biskuit Mujur	Jl. S.Limboto 27-29
12.	P. Biskuit SBS	Jl. S.Limboto Lr 50/5
13.	P. Roti Utama	Jl. S.Limboto Lr 53/28
14.	P. Roti Manalagi	Jl. Kijang 47
15.	p. Roti Remaja	Jl. Veteran Lr 44/1
16.	P.Mie Sinar Pagi	Jl. S.Limboto 53/21
17.	P. Mie Karya Harapan	Jl. Timor 52
18.	P. Mie Sinar Gowa	Jl. Veteran 204
19.	P. Minyak Sampurna	Jl. Urip Sumoharjo III/4
20.	P. Minyak Harapan Baru	Jl. Urip Sumoharjo III/8
21.	P. Minyak Tunas Jaya	Jl. Urip Sumoharjo II/46
22.	P. Kecap Sinar	Jl. Ternate 51
23.	P. Kecap Sumber Baru	Jl. Ternate 53
24.	P. Kecap Kemurahan	Jl. S.Limboto 54/1
25.	P. Kecap Ayam Panggang	Jl. Sembilan 15
26.	PT.Tirta Permata Sari	Jl. Masjid Raya 70
27.	P. Es Surya Dharma	Jl. Urip Sumoharjo III/10
28.	P. Minuman Setia	Jl. Irian
29.	P. Merk. Bintang Duhia	Jl. G.Merapi B
30.	P. Merk. Bola Dunia	Jl. Nusantara 356

31.	P. Kopi Setia	Jl. Irian
32.	P. Kopi Sari Utama	Jl. Sembilan 23
33.	P. Kopi Sejarah	Jl. Veteran 37
34.	P. Minuman Luxor	Jl. G.Latimojong 37
35.	P. Sirop SS	Jl. Andalas
36.	P. Sirpp DHT	Jl. Lembah 76
37.	P. Kopi Semangat	Jl. Yossudarso 226
38.	PT. Gimex	Jl. Urip Sumoharjo
39.	PT. Kartika M Sejati	Jl. Tinumbu
40.	Perc. Lectura	Jl. S.Pareman 7
41.	Perc. Rimbo	Jl. G.Salchutu 17
42.	Perc. Fajar	Jl. Kabaena 17
43.	Perc. Dipajaya	Jl. Kabaena 15
44.	Perc. CV Alam	Jl. Urip Sumoharjo 247
45.	Perc. Intisari	Jl. Achmad Yani 10
46.	Perc. Bila Utara	Jl. Gunung Merapi
47.	Perc. sumber Jaya	Jl. Lembah 43
48.	Perc. Usaha Timor	Jl. Timor 25

Sumber : Data sekunder dari Balai Hyperkes Departemen
Tenaga Kerja Prop. Sulawesi Selatan.